

**Judul** : UU Ciptaker memudahkan  
**Tanggal** : Selasa, 27 September 2022  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Bantu Pelaku UMKM

# UU Ciptaker Memudahkan

Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dinilai memberikan berbagai kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

SEKRETARIS Satgas Percepatan Sosialisasi UU Ciptaker Arief Budimanta mengatakan, kehadiran UU Ciptaker memberikan kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan bagi pelaku UMKM.

"Setidaknya ada tiga muatan itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja," kata Arief dalam diskusi bertajuk UU Cipta Kerja Tumbuhkan Pengusaha Muda dan UMKM, yang digelar Forum Merdeka Barat (FMB), kemarin.

Terkait aspek pemberdayaan, kata dia, dalam aturan turunan UU Ciptaker mengatur alokasi 40 persen bagi usaha mikro kecil dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Hal ini berlaku baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Kemudian, ada kewajiban atau fasilitas yang diberikan oleh negara.

Dalam hal ini, Pemerintah memberi pelatihan dan pendampingan serta penyediaan sistem sederhana yang terkait. "Misalnya, soal laporan

keuangan bagi pelaku UMKM," terangnya.

Terkait aspek perlindungan, Arief menyampaikan hal terkait dengan insentif, UU Ciptaker mengatur pembebasan pajak yang berbeda terhadap UMKM dibandingkan kelas usaha yang lebih besar.

Bagi usaha yang omzetnya kurang dari Rp 5 miliar, akan mendapatkan pajak final serta tarif yang sangat rendah.

Selain itu, pada aspek pemberdayaan, pelaku UMKM dimudahkan dengan program kredit usaha rakyat yang bunganya sangat rendah yakni sekitar 6 persen pada saat ini.

Tahun depan, menurut Arief, alokasi untuk kredit usaha akan menjadi Rp 480 triliun, sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh golongan pelaku UMKM.

Dalam diskusi tersebut, Kepala UKM Center Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Zahra Murad mengapresiasi UU Ciptaker untuk kemudahan bagi pelaku UMKM. Namun, ada beberapa catatan dalam



**Arief Budimanta**

penerapannya.

Zahra menyampaikan, sejauh ini masih banyak UMKM yang kesulitan memenuhi persyaratan kemitraan di sisi hulu.

Zahra menyampaikan, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah, yakni terkait literasi digital bagi pelaku UMK. Terutama dalam penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) oleh Pemerintah.

"Kalau kita lihat dari sisi karakteristik pemilik UMKM

waktu itu mengenai digitalisasi, ini faktor yang sebenarnya sedikit menjadi hambatan bagi mereka untuk mengambil bentuk pengaplikasian digitalisasi," terangnya.

Apabila usia pelaku UMKM di bawah 40 tahun, menurut Zahra, OSS tidak menjadi kendala karena mereka lebih digital literate. Tapi buat yang di atas 40 tahun atau pendidikan masih relatif rendah, ini menjadi tantangan.

"Mungkin ini tantangan yang patut dijadikan perhatian Pemerintah dan *stakeholder* lainnya," bebarnya.

Catatan lainnya yang harus diperhatikan dalam implementasi UU Ciptaker, yakni memperkuat kemitraan di sisi hulu dan hilir.

Sebab, menurutnya, potensi keberlanjutan kontrak dan *sustainability* baik perusahaan besar maupun UMK akan lebih besar.

"Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah," ucap dia menyarankan.

Hingga saat ini, total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah diterbitkan mencapai 2.086.019. Jumlah ini dihitung

per 25 September 2022.

Dari total tersebut, kurang lebih sekitar 868.555 atau 41,6 persen NIB merupakan usaha mikro kecil perseorangan. Dengan usia pelaku usaha rata-rata kurang dari 40 tahun.

Ketua Tim Kajian Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Bhirawa Ananditya Wicaksana mengatakan, ada tiga kelompok pengusaha yang tergabung di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

"Pertama, yang sifatnya *startup phase*. Pengusaha muda. Ini baru memulai usaha," jelasnya.

Sementara kategori kedua, lanjut Wicaksana, pengusaha lanjut Wicaksana, pengusaha *growth phase*. Di mana, seorang pengusaha muda bergabung dengan Hipmi dalam rangka meningkatkan pendapatan serta koneksi dan lain sebagainya.

"Jadi masuk ke Hipmi untuk meningkatkan pendapatan, serta untuk mengembangkan koneksi dan lain-lain," ungkap dia. Ketiga, *maturity phase*.

Wicaksana menjelaskan, pengurus Hipmi telah melakukan *profiling* terhadap para pengusaha yang masuk ke organisasi ini. Agar bisa memberikan *treatment* atau perlakuan, serta program sesuai level usahanya. ■ JAR